



SAT RESKRIM POLRES SANGGAU

Pencegahan & Penanganan

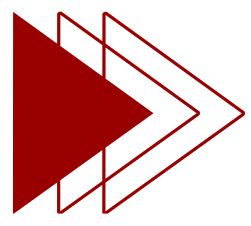
Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

AKP FARIZ KAUTSAR RAHMADHANI, S.Tr.K., S.I.K., M.A

Kasat Reskrim Polres Sanggau Polda Kalbar

**DANA
DANA
DESA**





KORUPSI



POLDA KALIMANTAN BARAT

Pengertian

Merugikan Keuangan Negara & Perekonomian Negara

(UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipidkor*)

- suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi.

Merupakan Suatu **Kejahatan**

- pelanggaran hak-hak sosial & ekonomi masyarakat luas
- perlu dilakukan pemberantasan dengan upaya yang luar biasa



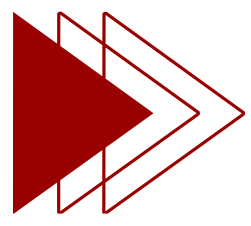
KBBI

- penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara
- menguntungkan pribadi/orang lain

Corruptio (Bhs. Latin)

- Tindakan merusak atau menghancurkan

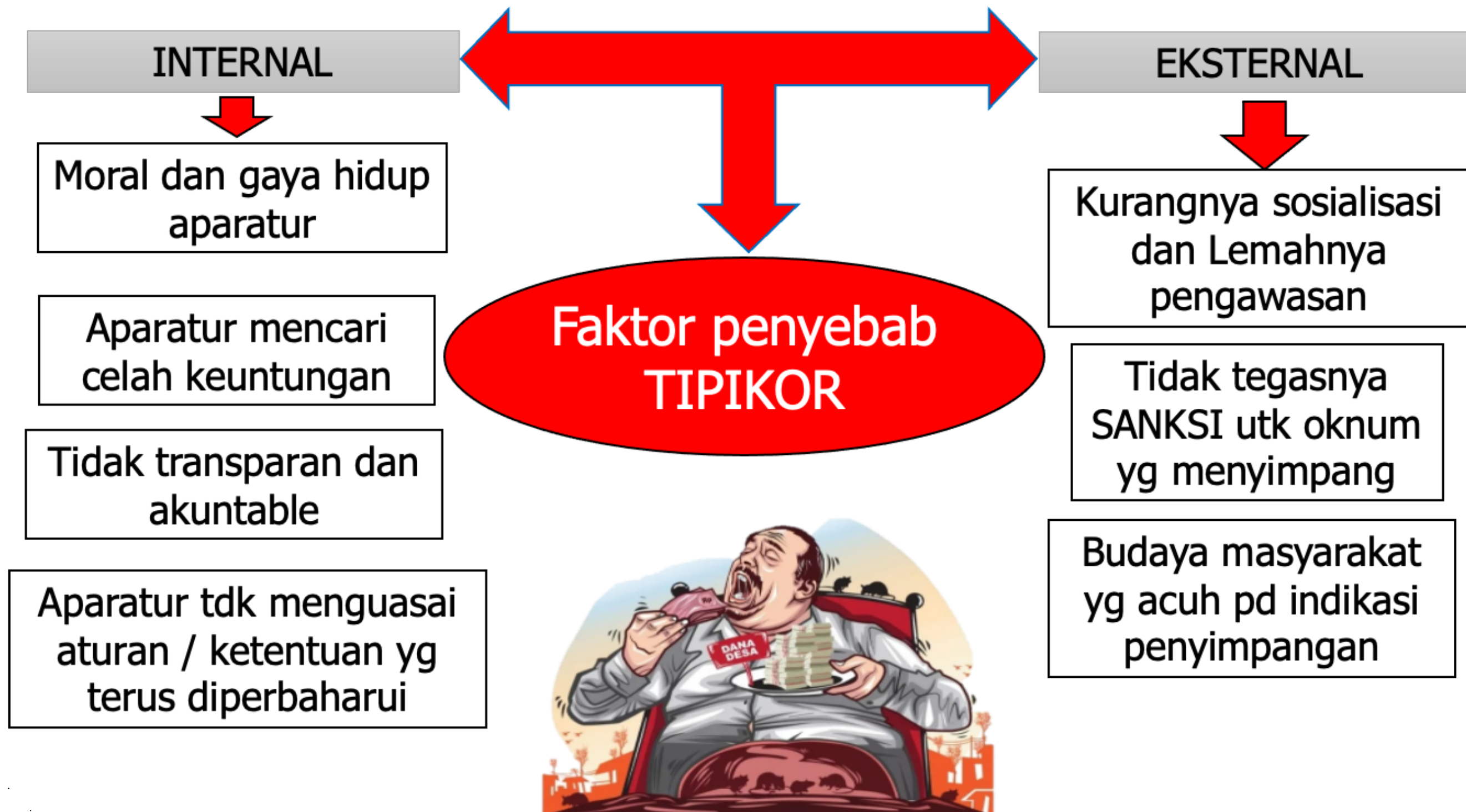
*pengertian Tipidkor juga telah masuk dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

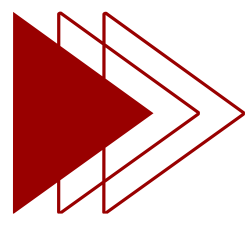


IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KORUPSI



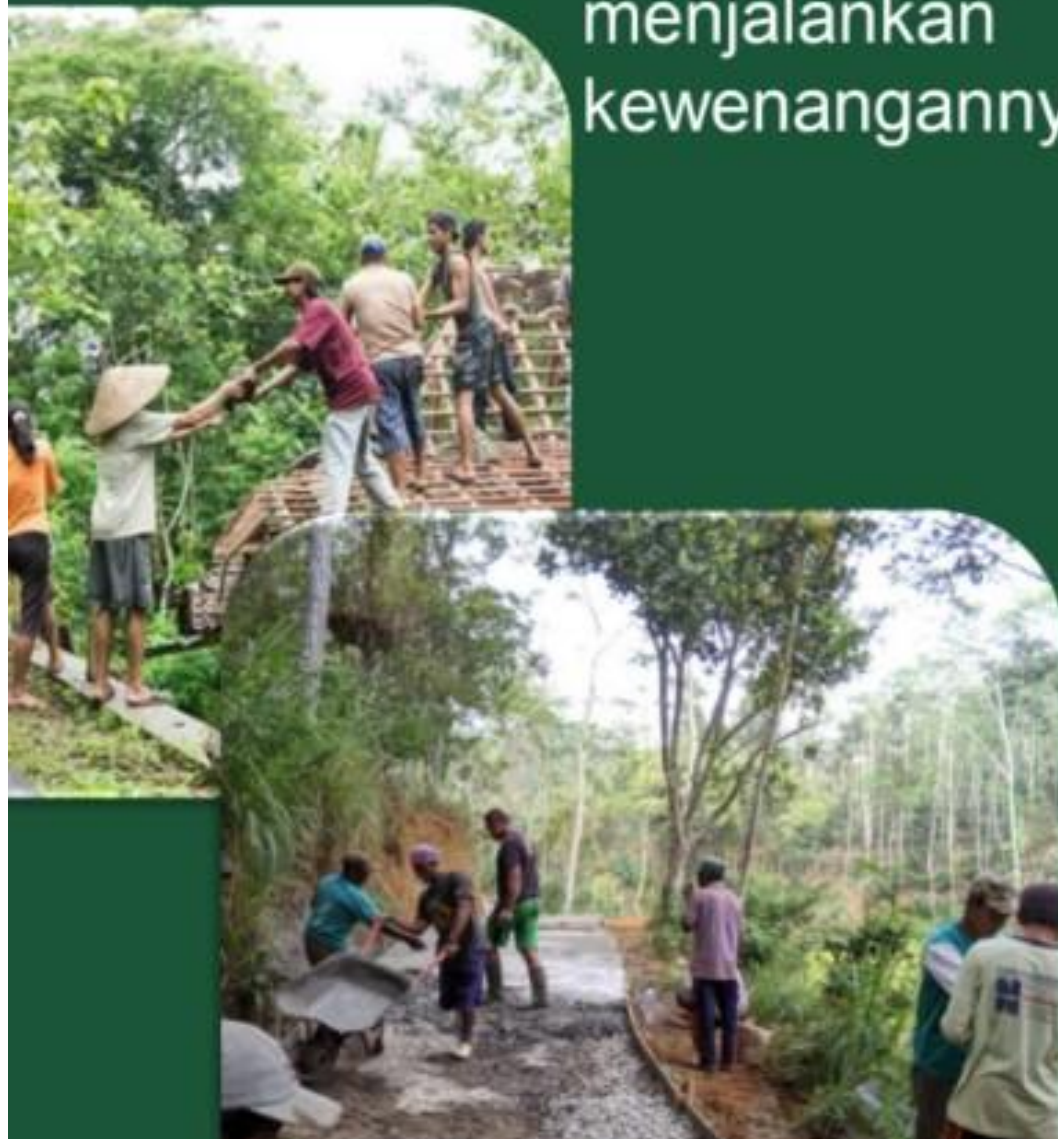
POLDA KALIMANTAN BARAT





KEBIJAKAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya



Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin

- Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll)
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa



Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik

TUJUAN DANA DESA

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis



meningkatkan pelayanan publik di desa



mengentaskan kemiskinan



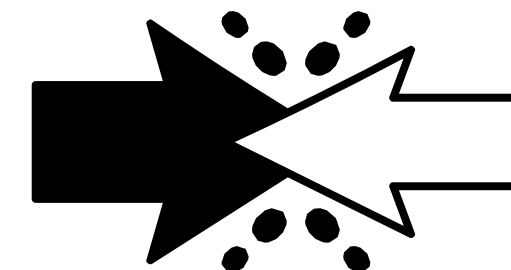
memajukan perekonomian desa



mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa



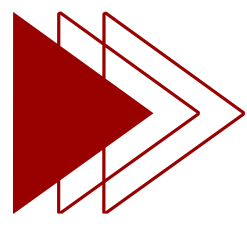
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan



KORUPSI



TIDAK
tercapai



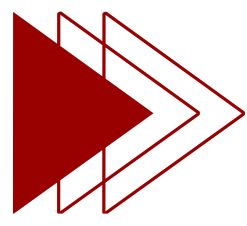
DASAR HUKUM

Pengelolaan Dana Desa



POLDA KALIMANTAN BARAT

- ✓ UU No. 28/ 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang bersih & bebas KKN
- ✓ UU No. 31/ 1999 ttg Pemberantasan Tipidkor dan perubahannya (UU No. 20/2001)
- ✓ UU No. 6/ 2014 ttg Desa dan perubahannya (UU No. 3 Tahun 2024)
- ✓ PP No. 43/ 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/ 2014 tentang Desa dan Perubahannya
- ✓ PP No. 60/ 2014 ttg Dana Desa yg bersumber dari APBN dan Perubahannya
- ✓ Permendagri No. 1/ 2016 ttg pengelolaan Aset Desa
- ✓ Permendagri No. 20/2018 ttg Pengelolaan Keuangan Desa
- ✓ Permendagri No. 73/ 2020 ttg Pengawasan Keuangan Desa
- ✓ Permendes, PDT & Trans No. 17/ 2019 ttg Pedoman Umum Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa
- ✓ Permendes, PDT & Trans No. 2/ 2015 ttg Pedoman Musyawarah Desa
- ✓ Permkeu No. 50/PMK.07/2020 ttg Perubahan Kedua atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 ttg Pengelolaan Dana Desa

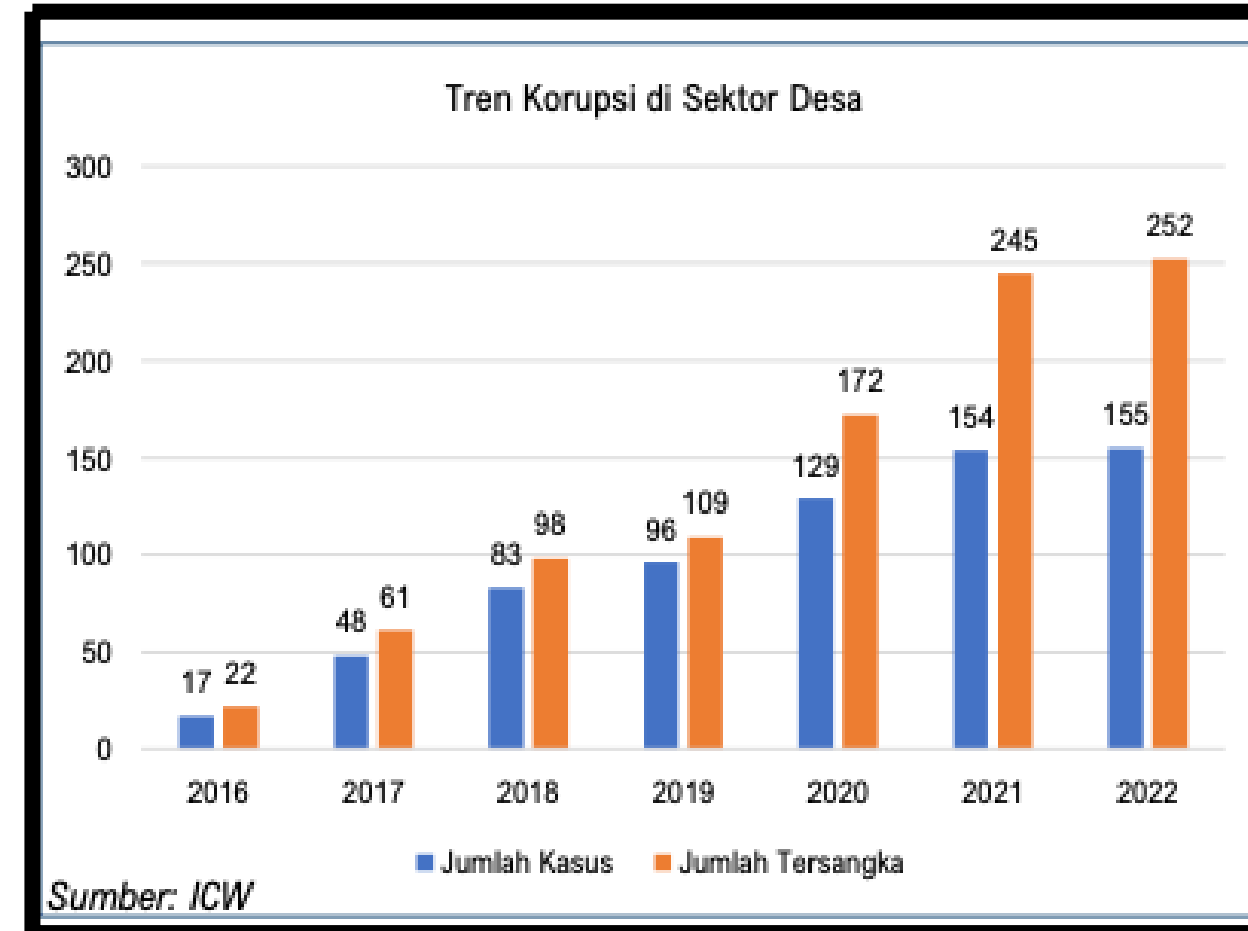


TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Gambaran Umum



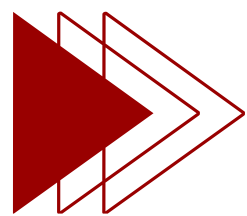
POLDA KALIMANTAN BARAT



Potensi Kerugian Negara Korupsi Sektor Desa 2016-2022 (Rp)



- korupsi Dana Desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 187 kasus



FENOMENA GUNUNG ES

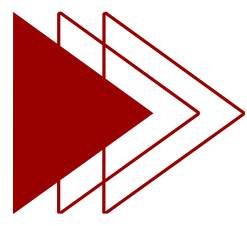
korupsi Dana Desa



POLDA KALIMANTAN BARAT



- Fenomena gunung es: kecil di permukaan (yang terlihat) dan membesar di bagian bawahnya (tidak terlihat)
- Data yang tersaji tentang Korupsi Dana Desa adalah “yang dilaporkan dan yang dilakukan penindakan” oleh APH
- Terdapat kemungkinan adanya Korupsi Dana Desa yang belum/ tidak terungkap



PENCEGAHAN

korupsi Dana Desa



POLDA KALIMANTAN BARAT

Regulasi & Kebijakan

- Regulasi yang jelas & tegas
- Transparansi Anggaran

Pengawasan&Audit

- Pengawasan internal
- Audit Eksternal

Sistem Informasi&Teknologi

- Sistem Informasi Keuangan Desa (SikeuDes)
- Penerapan e-Government

Kolaborasi&kemitraan

- kerjasama dengan LSM untuk pengawasan dan edukasi
- kemitraan dengan institusi akademis utk penelitian dan pengembangan strategi cegah korupsi

Pendidikan, Kesadaran & Implementasi langsung

- Pelatihan & Penyuluhan
- Kampanye Anti-Korupsi
- Sosialisasi regulasi
- Workshop & pelatihan
- Pengawasan Kolaboratif

Partisipasi Masyarakat

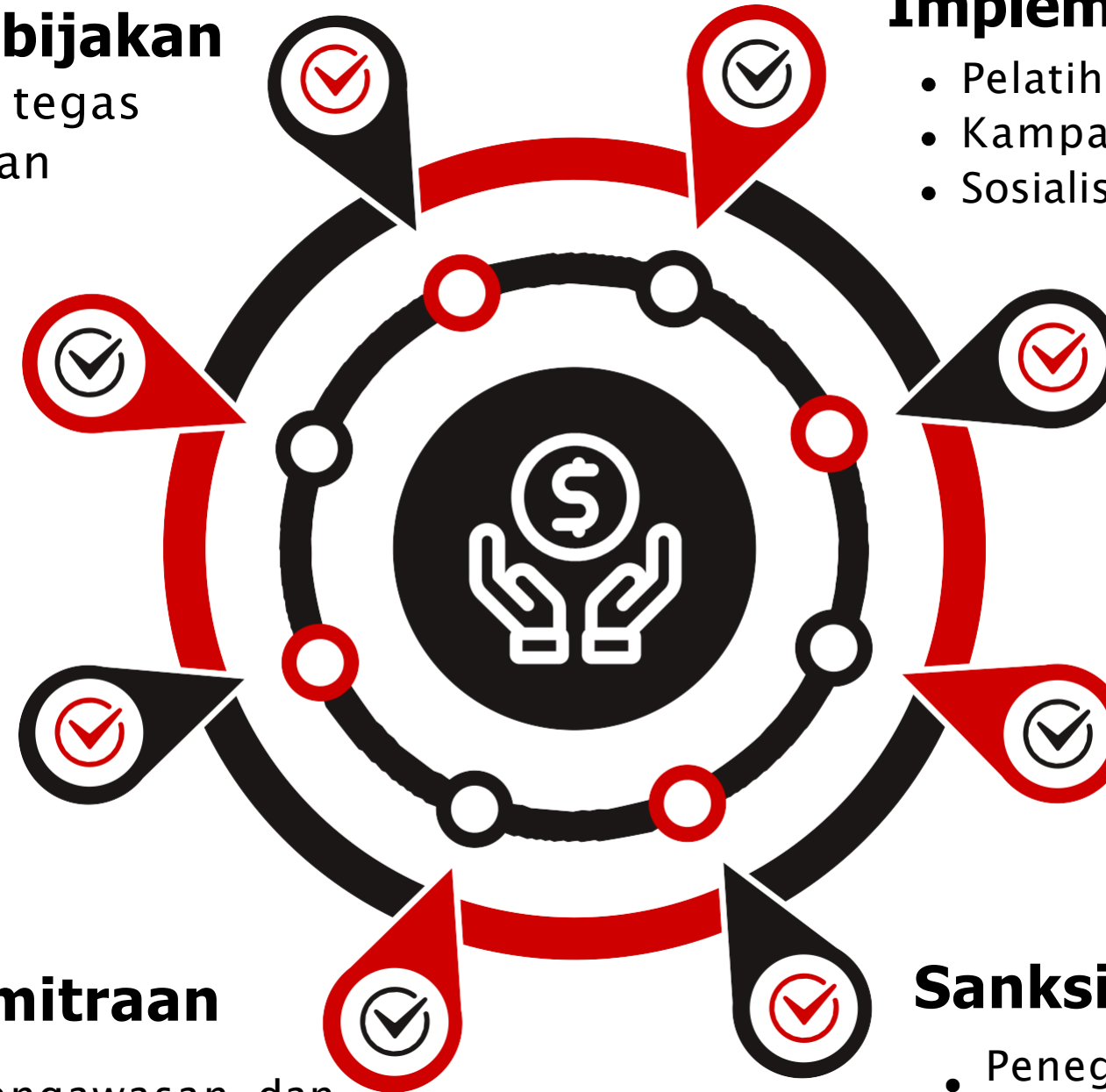
- Musyawarah Desa
- Pelaporan Warga

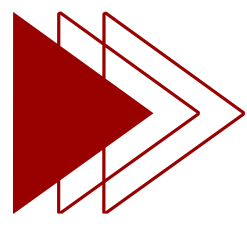
Peningkatan kapasitas Aparat Desa

- Rekrutmen aparat desa berbasis kompetensi
- pembinaan berkelanjutan

Sanksi & Penegakan Hukum

- Penegakan Hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku
- Perlindungan Pelapor (bagi warga) dari ancaman dan intimidasi



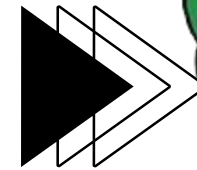


MEKANISME PENYELESAIAN

korupsi Dana Desa

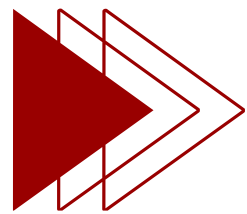


POLDA KALIMANTAN BARAT



- Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Daerah atau APIP
- Tindakan Korektif: pengembalian aset, perbaikan prosedur, sanksi adm (teguran, peringatan)
- Pengawasan & Monitoring agar pelanggaran tidak terulang

- Penyelidikan & Penyidikan oleh APH
- Proses Hukum apabila cukup bukti (hukuman penjara, denda atau sanksi lainnya)
- Pemulihan aset: penyitaan aset



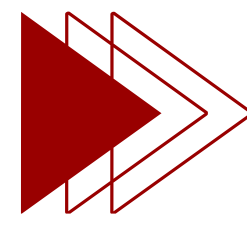
KORUPSI DANA DESA DI KALBAR

Gambaran Miris



POLDA KALIMANTAN BARAT



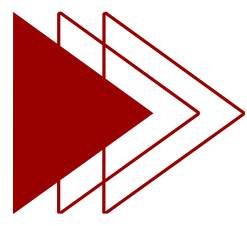


PENANGANAN T.P KORUPSI DANA DESA POLRES SANGGAU



POLDA KALIMANTAN BARAT

JENIS	KET
2 LAPORAN POLISI	1 LAPORAN (SELESAI) 1 LAPORAN (TAHAP PENYIDIKAN)
2 LAPORAN INFORMASI	2 LAPORAN (DALAM PROSES PENINGKATAN LIDIK KE SIDIK)



MODUS YANG BIASA DITEMUKAN



POLDA KALIMANTAN BARAT



Penggelembungan Dana (Mark Up)

biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa dengan cara menaikkan harga barang/ jasa dalam pertanggungjawaban keuangan



Anggaran untuk kepentingan/ urusan pribadi

Laporan pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasinya karena digunakan untuk kepentingan pribadi, cont: membayar hutang, membeli aset dll



Proyek Fiktif

Oknum aparat pemerintah atau perangkat desa membuat kegiatan, tapi sebenarnya tidak pernah ada.



Tidak sesuai Volume Kegiatan

Penyelesaian proyek tidak 100% atau mengurangi volume pekerjaan agar mendapat keuntungan

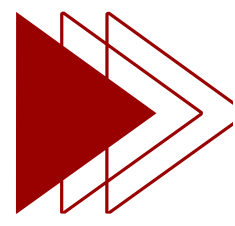


Laporan Palsu

laporan tersebut sering dimanipulasi, di antaranya melalui praktik pengurangan jumlah barang dari yang tercantum, mengubah kualitas barang menjadi lebih rendah, atau membuat pembelanjaan fiktif.



Penggelapan



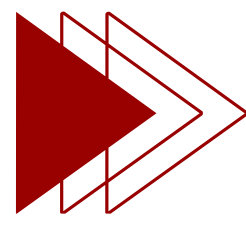
PASAL 13 : TUGAS POKOK

- ❖ MEMELIHARA KAMTIBMAS
- ❖ MENEGAKKAN HUKUM
- ❖ MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KPD

PASAL 14 HURUF c DAN d:

- ❖ MEMBINA MASY UTK MENINGKATKAN PARTISIPASI, KESADARAN HUKUM SERTA KETAATAN WARGA TERHADAP HUKUM DAN PER-
UU
- ❖ TURUT SERTA DALAM PEMBINAAN HK NASIONAL

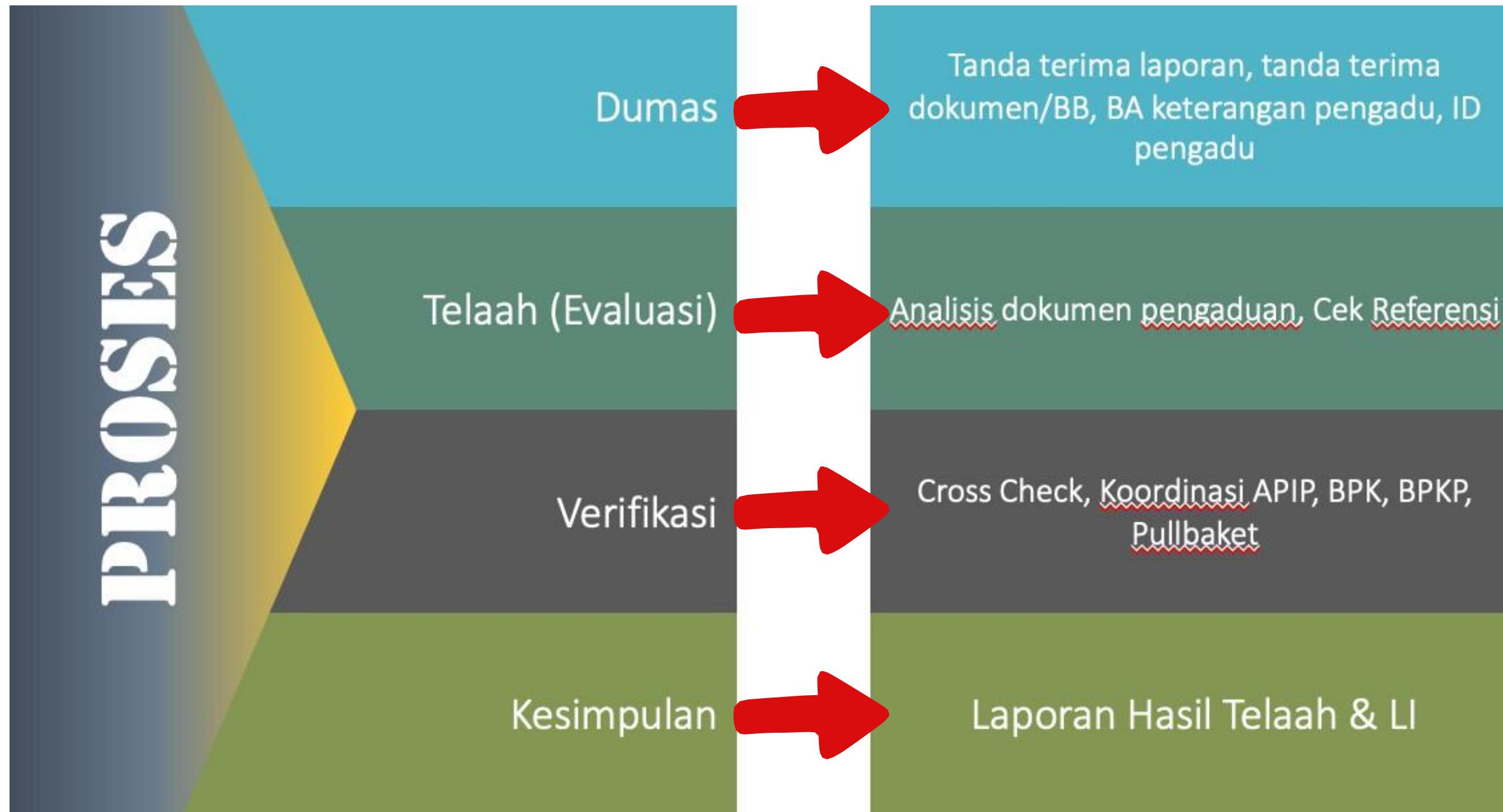
PASAL 14 HURUF g: MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIIDKAN TERHADAP SEMUA TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.



PENGELOLAAN DUMAS TIPIDKOR DI KEPOLISIAN



POLDA KALIMANTAN BARAT

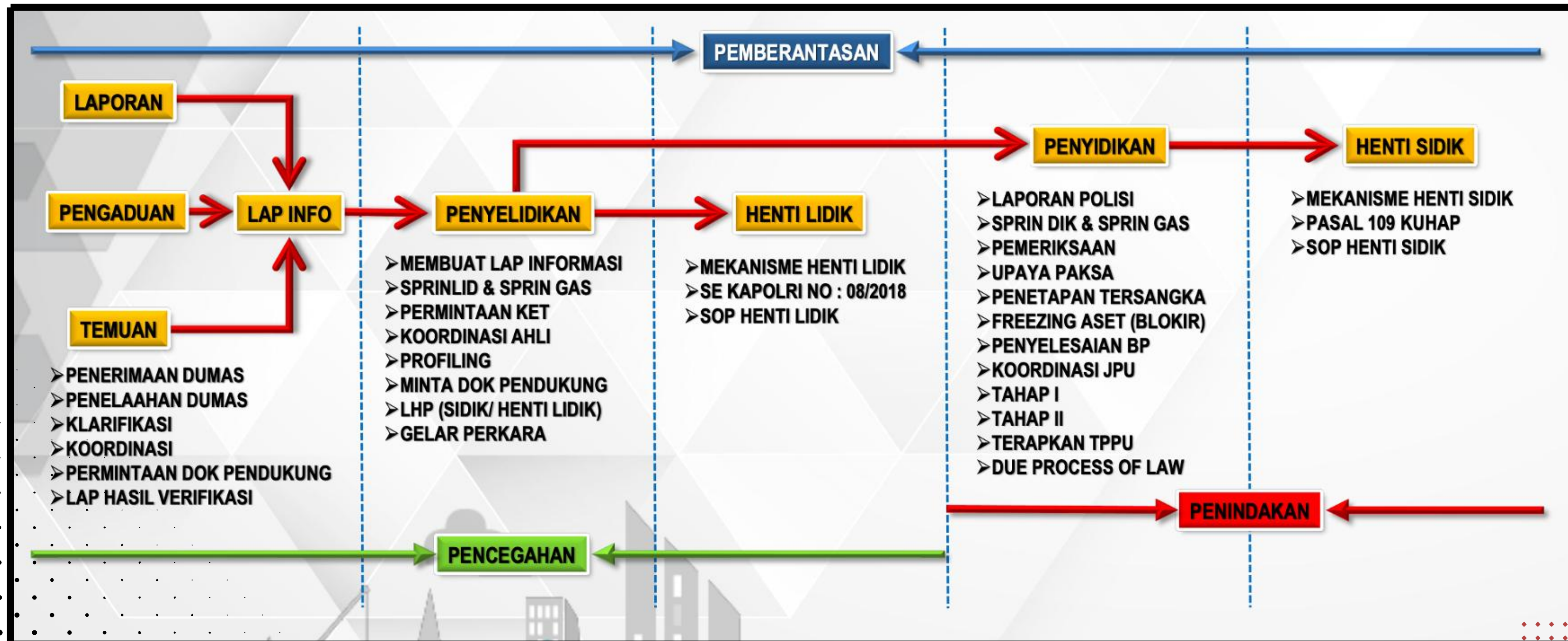


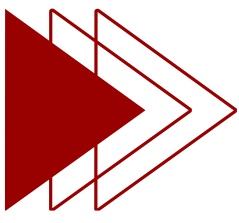
ALUR PENANGANAN TIPIIDKOR DI KEPOLISIAN

KUHAP, Perpol 6/2019, Perkaba 1/2023



POLDA KALIMANTAN BARAT





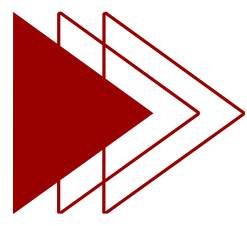
STRATEGI PEMBERANTASAN TIPIIDKOR



POLDA KALIMANTAN BARAT



TRANSFORMASI



PEDOMAN KERJA & CARA BERTINDAK



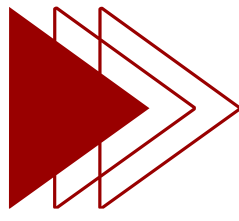
POLDA KALIMANTAN BARAT

□ PEDOMAN KERJA

- Kedepankan Sinergi (Kerma & Kolaborasi) Dengan K/L Serta Stake Holder Lainnya;
- Utamakan Cegah (Preemptif & Reventif) Serta Dahulukan Tata Kelola Yang Baik;
- Gakum Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*) & Maks Pemulihan KN.

□ CARA BERTINDAK

- **INSERT**
 - Komunikasi & kordinasi awal dgn APIP Ttg Program Pem di tiap K/L;
 - Sosialisasi sinergitas & kerma pengawasan bersama ttg prog tsb.
- **DECLARE**
 - Bersama APIP laksanakan deklarasi & sosialisasi kpd Satker pelaksana bahwa program Pem yg dilaks didampingi & diawasi.
- **ASSIST**
 - Laks pendampingan & asistensi thd pelaks program tsb melalui dialog, pertukaran data & informasi, diskusi, konsultasi, *problem solving* (fasilitasi bila terjadi kendala).
- **WARNING**
 - Laks pengawasan & monitoring bersma APIP thdp pelaks prog Pem;
 - Peringatkan/teguran bila ada indikasi penyimpangan prog tsb.
- **STRIKE**
 - Laks gakum thd penyimpangan sbg upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah dilakukan upaya pencegahan;
 - Utamakan peran APIP utk terapkan sanksi administratif & pemulihan KN.



POLDA KALIMANTAN BARAT

JANGAN
Korupsi Dana
Desa!!

